

**STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SOSIAL :
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin Di Kota Banjarmasin**

**(EVALUATION STUDY ON IMPACT OF SOCIAL POLICY:
Social Rehabilitation of Poor Housing in Banjarmasin)**

Suradi¹

Abstrak

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. RS-RTLH merupakan bantuan stimulan, agar fakir miskin menempati rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan dan dampak RS-RTLH bagi keluarga miskin di Kota Banjarmasin. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sosial dalam pengembangan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode) kuantitatif dan kualitatif dengan desain pretest-posttest. Sumber data primer diperoleh dari penerima manfaat sebanyak 40 orang, petugas dinas sosial, pendamping sosial, aparat kecamatan, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan-laporan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial dan kelompok penerima manfaat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, focus group discussion dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan RS-RTLH telah dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial, petugas kecamatan, kepala desa/lurah, kelompok dan penerima manfaat. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan meliputi; 1). yang berkaitan dengan penerima manfaat (umur, status perkawinan, dan kepemilikan lahan), 2). pedoman pelaksanaan (belum dilengkapi standar rumah layak huni, tahapan kegiatan dan indikator kinerja), dan 3). keterlambatan pencairan dana. Program RS-RTLH telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis. Meskipun demikian, implementasi RS-RTLH masih perlu dioptimalkan berkaitan dengan pemantapan pendamping sosial, waktu pencairan dan besarnya dana, tim pengendalian, biaya operasional pendamping, standardisasi rumah layak huni, dan sinergitas dengan berbagai sektor.

Kata kunci : keluarga miskin, kebijakan sosial, rumah layak huni.

Abstract

Social Rehabilitation of Poor Housing (RS-RTLH) is the Ministry of Social Affairs a social policy for poverty allevation in Indonesia. RS-RTLH a stimulant assistance, so that the poor occupy the appropriate house. This study aims to provide information on the implementation and impact of RS-RTLH for the poor in Banjarmasin. The results of the discussion is expected to be a matter of social policy reform in developing appropriate house for the poor. This evaluation study used a mixed methods quantitative and qualitative with pretest-posttest desain. Sources of primary data obtained from a total of 40 people beneficiaries, social services officials, auxiliary workers, district officials, village officials and community leaders. Then the source of secondary data obtained from the reports of Social Services Institution of South Kalimantan Province, Social Service and Labor Institution of Banjarmasin, social service aid, groups and beneficiaries. The data collection techniques are documentation studies, interviews, focus group discussions and observation. Based on the results obtained information, the RS-RTLH activities

have been carried out in synergy by Social Services Institution of South Kalimantan Province, Sosial Service and Labor Institution of the city of Banjarmasin, auxiliary workers, district officials, village official, community leader, groups and beneficiaries. However, there are some problems in the field related to the beneficiaries (age, marital status, and tenure), guidelines for implementation (not fitted appropriate house standard, stages and performance indicators), and the late disbursement of funds. Then on aspects of impact, RS-RTLH giving has a positive impact on meeting the needs of the home, social and psychological conditions. However, implementation of RS-RTLH still need to be optimized related to the strengthening of the auxiliary workers, timing and amount of disbursement of funds, control team, co-operating costs, appropriate house standardization, and synergism with various sectors.

Key words: *poor, the shelter deprivation, social policy.*

PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang memerlukan pemenuhan sesegera mungkin. Salah satu kebutuhan dimaksud, yaitu kebutuhan dasar (*basic needs*), dan oleh karena itu kebutuhan dasar ini berkaitan dengan hidup dan kelangsungan hidup (*survival*) manusia. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak dapat dipenuhi segera, maka akan menimbulkan permasalahan pada manusia, dimana manusia tersebut tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya, atau manusia tersebut tidak bersejahteraan sosial. Hal ini dapat dicermati dari definisi Medgley (Adi, 2008), bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika (1) berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, (2) ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan (3) ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

Secara garis besar kebutuhan manusia dibagi dua, yaitu fisiologis-organik dan psikis-sosial. Kebutuhan fisiologis-organik atau kebutuhan material adalah kebutuhan yang terkait langsung dengan pertumbuhan fisik manusia. Termasuk di dalam kebutuhan ini, yaitu tempat tinggal

(rumah), sandang, pangan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan psikis-sosial adalah kebutuhan yang terkait dengan perkembangan psikis dan sosial manusia. Termasuk di dalam kebutuhan ini, yaitu kebutuhan relasi sosial, menyatakan diri, kasih sayang, rasa aman dan harga diri (Gunarsa, 1992). Jika dikaitkan dengan pemikiran Medgley di atas, maka kebutuhan tempat tinggal (rumah) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang sekaligus sebagai unsur di dalam konsep kesejahteraan sosial.

Berdasarkan definisi tersebut, maka rumah merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi. Rumah dalam pengertian ini tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik-organik, yaitu terlindunginya orang dari ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, angin, dan hujan. Akan tetapi rumah juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial psikologis, seperti tempat yang menjamin kelangsungan hidup, pelembagaan nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial, memberikan rasa aman dan damai, dan meningkatkan harkat dan martabat. Rumah yang tidak layak huni secara fisik, sosial dan

¹. Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. E-mail : mas.soeradi@yahoo.co.id

psikologis, akan mempengaruhi komunikasi dan relasi sosial anggota keluarga, kebiasaan, pola pikir dan cara hidup, interaksi dengan lingkungan, dimana situasi tersebut akan mempengaruhi produktivitas (Yamantoko, 2012; Widodo 2012),

Pada kenyataannya, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan rumah karena alasan ekonomi atau kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Chambers yang dikutip oleh Mikkelsen (2010), bahwa kemiskinan digambarkan sebagai suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, terisolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Berbagai keterbatasan pada orang miskin tersebut, menyebabkan mereka tidak mampu menempati rumah layak huni. Mereka hanya mampu membangun rumah tidak permanen dari bahan-bahan yang mudah rusak atau bahan-bahan bekas. Bahkan di daerah perkotaan, kemiskinan menyebabkan orang terpaksa membangun perkampungan kumuh dengan rumah gubuk di lahan-lahan pemerintah. Karena itu masyarakat umum mengenal dengan perkampungan liar atau daerah *slum*.

Kementerian Sosial RI pada tahun 2011 mencatat, bahwa fakir miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan berjumlah 7,6 juta jiwa. Kemudian dari jumlah tersebut yang menempati rumah tidak layak huni berjumlah 4.6 juta jiwa atau 60,53 persen (Pusdatin Kesos, 2011). Hal ini membawa implikasi pada kebijakan sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial dan pemenuhan rumah layak huni.

Merespon kondisi fakir miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Sosial RI mengembangkan

kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). RS-RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Kegiatan RS-RTLH tersebut merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Soetarso, 1980; Suharto, 2007).

Kegiatan RS-RTLH tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat (Dit. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011).

Untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil kegiatan RS-RTLH, sesungguhnya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan telah melakukan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dari dokumen yang tersedia pada direktorat tersebut, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru menggambarkan aspek output.

Penelitian evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil pada kegiatan RS-RTLH. Sehubungan dengan itu, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui aspek input, proses dan produk yang menggambarkan *outcome* pada kegiatan RS-RTLH. Khusus berkaitan dengan aspek produk, rumusan hipotesa penelitiannya, adalah:

H1 = *ada pengaruh RS-RTLH terhadap kesejahteraan keluarga miskin.*

$H_0 =$ tidak ada pengaruh RS-RTLH terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

Berdasar hipotesa penelitian tersebut, sebagai variabel bebas adalah kegiatan RS-RTLH, dan sebagai variabel terikatnya adalah kesejahteraan. Untuk variabel terikat, diturunkan menjadi sub variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan kondisi psikologis.

Desain penelitian evaluasi adalah *pretest-posttes* dengan pendekatan campuran (*mixed methode*) antara kualitatif dan kuantitatif. Sumber data primer diperoleh dari penanggung jawab program pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banjarmasin, ketua kelompok, penerima manfaat, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kelurahan. Khusus pada penerima manfaat, data dikumpulkan dari 40 orang sebagai sampel dari 100 orang. Kemudian data sekunder diperoleh dari laporan pelaksanaan RS-RTLH pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial, petugas kecamatan, kepala desa/kelurahan dan pengurus kelompok. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumentasi, wawancara, observasi lapangan dan *focus group discussion*. Adapun lokasi pengumpulan data, yaitu Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan pengaruh RS-RTLH terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan kondisi psikologis. Untuk itu digunakan uji pengaruh dari willcoxon dengan bantuan SPP+PC. Uji willcoxon ini digunakan dengan pertimbangan (1) skala ordinal, (2) *pretest-*

posttes desain, dan (3) tanpa kelompok kontrol. Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian ditentukan dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0.05. Dengan memanfaatkan taraf signifikan sebesar 0.05 tersebut, maka kriteria menerima atau menolak hipotesa penelitian adalah apabila $Asymp.Sig$ (2-tailed) \leq (0.05), maka tolak H_0 , yaitu :

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah, Kondisi Sosial dan Psikologis Keluarga Miskin

Selanjutnya, untuk mengetahui derajat pengaruh RS-RTLH, data yang masuk diskoring dan dikategorisasi, sehingga diperoleh informasi dampak RS-RTLH. Apakah dampak RS-RTLH termasuk kategori rendah, sedang dan tinggi pada variabel pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis keluarga miskin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas pelaksanaan dan dampak kegiatan RS-RTLH, perlu disampaikan terlebih dahulu aspek kuantitatif kemiskinan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin yaitu 30.301 orang atau 4,80 persen dari total penduduk kota Banjarmasin sebanyak 625.395 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,03 persen dibanding tahun sebelumnya, yang berjumlah 29.506 jiwa. Namun demikian, angka tersebut mengundang perdebatan di lingkungan DPRD karena garis kemiskinan dan kriteria yang digunakan dinilai tidak rasional, sehingga tidak bisa menggambarkan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak RS-RTLH bagi keluarga miskin di Kota Banjarmasin, ditetapkan tiga aspek yang menjadi pokok pembahasan, yaitu **aspek**

input, proses dan produk RS-RTLH bagi fakir miskin.

Aspek Input

a. Penerima Manfaat

Pada unsur penerima manfaat RS-RTLH, dicermati aspek umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan status tanah. Dilihat dari aspek umur, dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori umur 18-55 tahun dan 56 tahun ke atas. Berdasarkan kategori umur tersebut, diperoleh data sama besar pada dua kategori tersebut, yaitu 50 persen. Selanjutnya, dilihat dari aspek jenis kelamin, diperoleh data laki-laki 72.5 persen dan perempuan 17.5 persen. Kemudian dilihat dari aspek pendidikan, 92.5 persen termasuk pendidikan rendah, yaitu tidak sekolah, SD dan SLP. Pendidikan yang rendah tersebut akan berpengaruh pada persepsi, pola pikir, olah rasa dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi masalah, mau pun dalam melaksanakan peran-peran sosialnya.

Dilihat dari aspek pekerjaan, pada umumnya penerima manfaat RS-RTLH memiliki pekerjaan kategori rendah, yaitu dagang kecil-kecilan, jasa transportasi, buruh, tani, guru ngaji dan bahkan ada yang tidak bekerja (20 %). Bagi penerima manfaat yang tidak bekerja, mereka menggantungkan bantuan pada anak, saudara dan tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Relevan dengan jenis pekerjaan, pada umumnya penerima manfaat RS-RTLH berpenghasilan rendah dan berdasarkan kriteria BPS masuk kategori miskin dan sangat miskin. Kemudian dilihat dari kepemilikan tanah, 92.5 persen tanah miliki sendiri yang dibuktikan dengan surat-surat yang syah.

b. Sarana Kerja

Sarana kerja, seperti pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan, pedoman teknis RS-RTLH, tersedia di

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banjarmasin, pendamping sosial, dan sudah menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut seluruhnya disusun oleh Kementerian Sosial RI. Belum ada inisiatif dari Dinas Sosial provinsi dan Kota Banjarmasin untuk membuat pedoman teknis sebagai penjabaran dari pedoman pelaksanaan RS-RTLH yang disusun Kementerian Sosial.

c. Pendamping sosial

Di dua kelurahan lokasi penelitian terdapat empat orang pendamping sosial yang seluruhnya laki-laki. Dua orang dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dua orang dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kuantitas mau pun kualitas pendamping sosial cukup memenuhi kualifikasi. Mereka telah memperoleh pelatihan pendampingan sosial, baik dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial provinsi dan Kota Banjarmasin berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Selain itu menurut penilaian Dinas Sosial mereka memiliki loyalitas dan dedikasi dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial.

d. Dana

Setiap kelompok mengelola dana bantuan stimulan sebesar Rp. 100 juta. Dana tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat melalui rekening kelompok masing-masing sebesar Rp. 10 juta. Dana tersebut kemudian dipisahkan menurut penggunaannya, yaitu Rp. 9 juta untuk bahan bangunan dan Rp. 1 juta untuk ongkos tukang. Dana kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan mekanisme dekonsentrasi.

Berkaitan dengan aspek input, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Kriteria penerima manfaat adalah fakir miskin yang mengacu pada kriteria Badan Pusat Statistik. Namun ketika terkait dengan batasan usia, tidak ada ketentuan usia minimum mau pun usia maksimum bagi penerima manfaat RS-RTLH. Oleh karena itu, ditemukan penerima manfaat RS-RTLH yang usianya 60 tahun ke atas. Padahal, umur 60 tahun ke atas masuk definisi lanjut usia, yang menjadi sasaran program Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- b. Instrumen kegiatan dalam bentuk pedoman-pedoman sebagai acuan kerja seluruhnya disusun oleh Kementerian Sosial RI. Padahal, setiap daerah memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda, sehingga tidak bisa diperlakukan generalisasi. Selain itu ada hal-hal teknis yang perlu diatur lebih lanjut dalam upaya memberikan kemudahan bagi pendamping sosial.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap rumah sebesar Rp 9 juta rupiah dan ongkos tukang sebesar Rp. 1 juta. Anggaran tersebut belum memadai, karena hampir separuhnya diserap untuk pembelian kayu-kayu pondasi (*cerucuk*). Akibatnya dinding rumah sebagian dari bahan tiplek atau blocitic yang tentu saja tidak akan bertahan lama (kurang 5 tahun).

Aspek Proses

Pada aspek prosedur uraian “siapa” melakukan “apa”. Pada RS-RTLH, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sosialisasi, verifikasi data calon penerima manfaat, seleksi, memfasilitasi penyaluran bantuan, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, monitoring dan pelaporan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, yaitu pendataan, sosialisasi, penggerakan partisipasi masyarakat, penetapan calon penerima manfaat, memfasilitasi pembentukan kelompok, pembentukan tim

pelaksana teknis, memfasilitasi pembukaan rekening kelompok, persetujuan pencairan dana bantuan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial, baik pendamping sosial kecamatan mau pun kelurahan, yaitu sosialisasi kepada penerima manfaat, pengumpulan data dan mengusulkan ke Instansi sosial Kota Banjarmasin (mengetahui RT/RW, Lurah dan Camat), melakukan monitoring dan memberikan penjelasan lain terkait dengan RS-RTLH. Pendamping sosial dalam melaksanakan tugasnya memperoleh dukungan dari aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat setempat. Meskipun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, pendamping sosial belum didukung dengan biaya operasional, sehingga (1) kurangnya intensitas pendampingan dan (2) keterbatasan kemilikan data dan dokumen yang berkaitan dengan RS-RTLH.

Rehabilitasi sosial rumah dilakukan dalam beberapa cara, yaitu diborong tukang (12.50 %), tukang dan gotong royong (10 %) dan dikerjakan tukang dan keluarga (77.50 %). Berdasar data tersebut, konteks sosial dari RS-RTLH masih belum optimal. Seharusnya, kegiatan RS-RTLH menggerakkan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar. Meskipun demikian, cara-cara yang ditempuh penerima manfaat tersebut dapat dimaklumi, karena waktu efektif rehabilitasi rumah sangat terbatas. Oleh sebab itulah, maka rehabilitasi rumah dilakukan secara serentak.

Meskipun berbagai kegiatan telah dilakukan, tetapi ditemukan beberapa permasalahan di lapangan yang mempengaruhi proses RS-RTLH, yaitu :

- a. Sosialisasi dan penyiapan kondisi sosial masyarakat belum dilaksanakan secara optimal yang didasarkan pada informasi berikut :

- 1) Tidak semua penerima manfaat mengetahui, bahwa kegiatan RS-RTLH adalah kebijakan dari Kementerian Sosial RI.
 - 2) Tidak semua penerima manfaat mengetahui besarnya bantuan pada kegiatan RS-RTLH, karena mereka menerima bahan bangunan yang dikoordinasikan ketua kelompok.
 - 3) Tidak semua penerima manfaat mengetahui, bahwa RS-RTLH merupakan kegiatan rehabilitasi rumah. Sebagian penerima manfaat memahami sebagai kegiatan bedah rumah, atau pembangunan rumah secara keseluruhan (total). Karena itu, penerima manfaat tersebut menghendaki RS-RTLH sesuai dengan keinginannya.
 - 4) Ada kecemburuan dan kesalahpahaman dari sebagian masyarakat dan LSM terhadap kegiatan RS-RTLH. Mereka menilai bahwa kegiatan RS-RTLH disalahgunakan oleh pelaksana dari Instansi Sosial bersama-sama dengan pendamping sosial.
- b. Pencairan anggaran pada bulan November, dimana pada bulan tersebut memasuki musim penghujan. Pengaruhnya adalah harga-harga bahan bangunan mengalami kenaikan, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat. Selain kenaikan harga bahan bangunan, waktu pengerjaan rehabilitasi rumah menjadi cukup lama, yang pengaruhnya pada besarnya ongkos tukang.
 - c. Belum adanya standarisasi rumah layak huni yang menjadi acuan, sehingga ukuran (luas rumah) dan struktur (pembagian ruang) rumah mengikuti rumah aslinya. Implikasinya, kondisi rumah (lantai, atap, dinding) dan struktur rumah tidak standar karena tergantung keinginan penerima manfaat.
 - d. Tidak adanya pengendalian dalam penggunaan anggaran rehabilitasi rumah.

Hal ini menyebabkan sebagian penerima manfaat yang terdesak kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan sebagian bantuan RS-RTLH. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan rehabilitasi rumah, mereka terpaksa meminjam ke orang lain. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru bagi penerima manfaat RS-RTLH di kemudian hari.

- e. Belum adanya biaya operasional pendamping sosial, sehingga mereka mengalami hambatan pada pelaksanaan : (1) koordinasi dengan aparat kelurahan, aparat kecamatan dan Dinas Sosial, (2) pemantauan ke lokasi kegiatan, dan (3) pembuatan laporan dan penggandaan bahan-bahan yang diperlukan.

Aspek Produk Kegiatan

Pada pembahasan hasil kegiatan diuraikan dampak kegiatan RS-RTLH terhadap tiga variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis.

a. Pemenuhan Kebutuhan Rumah

Pemenuhan kebutuhan rumah menggambarkan sebuah rumah yang penghuninya tidak kejujuran, tidak kepanasan, berkumpul bersama anggota keluarga, dan tempat untuk beristirahat. Pada variabel pemenuhan kebutuhan rumah ini yang diukur adalah aspek kondisi lantai, dinding, atap, pembagian ruangan, WC dan ventilasi.

Berkaitan dengan itu telah ditetapkan hipotesa penelitian sebagai berikut :

- 1) H1 = *Ada Pengaruh RS-RTLH terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Keluarga Miskin.*
- 2) H0 = *Tidak ada Pengaruh RS-RTLH terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Keluarga Miskin.*

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesa penelitian ditentukan

dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0.05. Dengan memanfaatkan taraf signifikan sebesar 0.05 tersebut, maka kriteria menolak H_0 apabila $Asymp.Sig (2-tailed) \leq 0.05$. Artinya:

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Keluarga Miskin

Untuk pembentuktian hipotesa tersebut digunakan uji pengaruh dari willcoxon, sehingga menghasilkan data sebagai berikut :

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
sebelum	40	7.6750	1.20655	6.00	10.00
sesudah	40	12.2750	1.83956	8.00	15.00

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
sesudah - sebelum	Negative Ranks	0a	.00	.00
	Positive Ranks	40b	20.50	820.00
	Ties	0c		
	Total	40		

a. sesudah < sebelum

b. sesudah > sebelum

c. sesudah = sebelum

Test Statistics^b

		sesudah - sebelum
Z		-5.558a
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Pengujian subhipotesa dengan menggunakan alat uji statistik dari willcoxon, diperoleh informasi bahwa $Asymp.Sig (2-tailed)$ sebesar 0.00, dimana hasil uji tersebut < 0.05. Maka keputusannya menolak H_0 , artinya :

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Keluarga Miskin

Berdasarkan pengujian hipotesa tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa RS-RTLH telah meningkatkan pemenuhan

kebutuhan rumah pada keluarga miskin pada aspek kondisi lantai, dinding, atap, pembagian ruangan, WC dan ventilasi. Selanjutnya, berdasar hasil skoring dan kategorisasi, diperoleh informasi bahwa terjadi perubahan yang signifikan, antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan rehabilitasi rumah. Perubahan dimaksud sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.
Pengaruh RS-RTLH terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah.

Kategori	Skoring	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Rendah	6 - 9	85	0
Sedang	10 - 13	15	22,5
Tinggi	14 - 18	0	77.5
Jumlah		40	100

Sumber : hasil penelitian, 2012
N = 40

Berdasarkan data tersebut, RS-RTLH sebagai sebuah kebijakan sosial penanggulangan kemiskina, memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah keluarga miskin. Sebanyak 77.5 persen responden pada kategori tinggi, dan 22.5 persen kategori sedang. Permasalahan pada kategori sedang, yaitu bahan bangunan kurang bertahan lama, belum memiliki WC dan ventilasi masih terbatas.

Kondisi Sosial

Kondisi sosial menggambarkan terjalannya suatu interaksi dan relasi sosial antara orang dalam kesatuan sosial, mampu menampilkan tugas-tugas sosial dan akses terhadap

pelayanan sosial. Pada variabel kondisi sosial yang diukur adalah kegiatan bersama anggota keluarga, kegiatan bersama dengan saudara/famili, tetangga dekat, dan kegiatan sosial di lingkungan.

Berkaitan dengan itu telah ditetapkan hipotesa penelitian sebagai berikut :

- 1) H1 = *Ada Pengaruh RS-RTLH terhadap kondisi Sosial Rumah Keluarga Miskin.*
- 2) H0 = *Tidak ada Pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Sosial Keluarga Miskin.*

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesa penelitian ditentukan dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0.05. Dengan memanfaatkan taraf signifikan sebesar 0.05 tersebut, maka kriteria menolak H0 apabila $Asymp.Sig (2-tailed) \leq (0.05)$. Artinya:

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Sosial Keluarga Miskin

Untuk pembuktian hipotesa tersebut digunakan uji pengaruh dari willcoxon yang menghasilkan data sebagai berikut :

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
sebelum	40	7.7000	1.18105	6.00	10.00
sesudah	40	12.3500	1.88856	8.00	15.00

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
sesudah- sebelum	Negative Ranks	0 ^a	.00
	Positive Ranks	40 ^b	20.50
	Ties	0 ^c	
	Total	40	

- a. sesudah < sebelum
b. sesudah > sebelum
c. sesudah = sebelum

Test Statistics

	sesudah - sebelum
Z	-5.558a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Pengujian subhipotesa dengan menggunakan alat uji statistik dari wilcoxon, diperoleh informasi bahwa Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.00, dimana hasil uji tersebut < 0.05 . Maka keputusannya menolak H_0 , artinya :

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Sosial Keluarga Miskin

Berdasarkan pengujian hipotesa tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa RS-RTLH telah meningkatkan kondisi sosial pada keluarga miskin pada aspek kegiatan bersama anggota keluarga, kegiatan bersama dengan saudara/famili, tetangga dekat, dan kegiatan sosial di lingkungan. Selanjutnya, berdasar hasil skoring dan kategorisasi, diperoleh informasi bahwa terjadi perubahan positif, antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan rehabilitasi rumah. Perubahan dimaksud sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2
Pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Sosial

Kategori	Skoring	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Rendah	4 - 7	0	0
Sedang	8 - 11	15	10
Tinggi	12 - 16	85	90
Jumlah		40	100

Sumber : hasil penelitian, 2012

$N = 40$

Berdasar data tersebut, RS-RTLH sebagai sebuah kebijakan sosial penanggulangan kemiskina, memberi dampak positif terhadap kondisi sosial keluarga miskin, meskipun perubahan yang terjadi tidak cukup signifikan.

Pada kategori tinggi terjadi perubahan dari 85 persen menjadi 90 persen atau hanya terjadi peningkatan sebesar 5 persen. Artinya, sebelum ada RS-RTLH sebagian besar penerima manfaat sesungguhnya sudah dalam kondisi sosial yang cukup baik.

Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis menggambarkan seseorang merasa aman, nyaman, betah/ tenteram, dihargai dan bermartabat. Pada variabel kondisi psikologis ini yang diukur adalah rasa betah/tentram, aman, nyaman dan perilaku hidup bersih.

Berkaitan dengan itu telah ditetapkan hipotesa penelitian sebagai berikut :

- 1) $H_1 =$ *Ada Pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Psikologis Keluarga Miskin.*
- 2) $H_0 =$ *Tidak ada Pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Psikologis Keluarga Miskin.*

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian ditentukan dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0.05. Dengan memanfaatkan taraf signifikan sebesar 0.05 tersebut, maka kriteria menolak H_0 apabila Asymp.Sig (2-tailed) $\leq (0.05)$. Artinya:

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Psikologis Keluarga Miskin

Untuk pembentuktian hipotesa tersebut digunakan uji pengaruh dari wilcoxon, yang menghasilkan data sebagai berikut :

Pengujian sub hipotesa dengan menggunakan alat uji statistik dari wilcoxon, diperoleh informasi bahwa Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.00, dimana hasil uji tersebut < 0.05 . Maka keputusannya menolak H_0 , artinya :

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
sebelum	40	7.7000	1.18105	6.00	10.00
sesudah	40	12.3500	1.88856	8.00	15.00

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
sesudah - sebelum	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	40 ^b	20.50	820.00
	Ties	0 ^c		
	Total	40		

a. sesudah < sebelum

b. sesudah > sebelum

c. sesudah = sebelum

Test Statistics

	sesudah - sebelum
Z	-5.558a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

ada pengaruh RS-RTLH terhadap Kondisi Psikologis Keluarga Miskin

Berdasarkan pengujian hipotesa tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa RS-RTLH telah meningkatkan kondisi psikologis pada keluarga miskin pada aspek rasa betah/tentram, aman, nyaman dan perilaku hidup bersih. Selanjutnya, berdasar hasil skoring dan kategorisasi, diperoleh informasi bahwa terjadi perubahan yang signifikan, antara sebelum dan sesudah diberikan bantuan rehabilitasi rumah. Perubahan dimaksud sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3

Dampak RS-RTLH terhadap Kondisi Psikologis

Kategori	Skoring	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Rendah	6 - 11	45	0
Sedang	12 - 17	55	0
Tinggi	18 - 24	0	100
Jumlah		40	100

Sumber : hasil penelitian, 2012

N = 40

Berdasar data tersebut, bahwa kegiatan RS-RTLH sebagai sebuah kebijakan sosial penanggulangan kemiskinan, telah memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis keluarga miskin. Sesudah kegiatan RS-RTLH, seluruh penerima manfaat berada pada kategori tinggi, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya berada pada kategori rendah sebanyak 45 persen dan sedang sebanyak 55 persen.

Dukungan dan Tantangan

RS-RTLH di Kota Banjarmasin dapat dilaksanakan karena adanya kondisi yang mendukung, yaitu (1) dukungan wali kota yang terlibat langsung pada tahap pencairan

dan pemantauan, (2) koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin cukup baik, dan (3) dedikasi dan kekompakan pendamping sosial kecamatan mau pun pendamping sosial kelurahan. Pada pelaksanaan kegiatan, mereka membentuk tim kerja untuk saling membantu. Para pendamping sosial tersebut juga sudah membentuk Forum Pendamping, dimana mereka memiliki jadwal pertemuan rutin mingguan dan agenda kerja berdasarkan bimbingan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Meskipun demikian, pelaksanaan RS-RTLH tersebut tidak lepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Sosial mau pun pendamping, yaitu (1) penerima manfaat memahami RS-RTLH sebagai program bedah rumah, sehingga mereka menghendaki seluruh rumahnya diperbaiki sesuai kemauannya, (2) kesalahpahaman sebagian masyarakat yang menyebabkan Dinas Sosial dan pendamping dipanggil kejaksaan untuk memberikan klarifikasi, dan (3) pencairan anggaran bersamaan dengan musim penghujan, sehingga terjadi kenaikan harga bahan bangunan dan ongkos tukang bertambah karena hari kerja bertambah. Berbagai tantangan tersebut dapat diatasi, dan kegiatan RS-RTLH dapat dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

Deskripsi mengenai aspek input, pelaksanaan dan dampak serta dukungan dan tantangan pada kegiatan RS-RTLH tersebut, memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan sosial dan kesejahteraan sosial fakir miskin. Berdasarkan perspektif kesejahteraan sosial, bahwa kebijakan sosial yang dioperasionalkan ke dalam RS-RTLH berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan sosial fakir miskin. Sebagaimana didefinisikan Medgley (Adi, 2008) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan

sosial di dalamnya mencakup unsur kebutuhan dasar/material, sosial dan mental/psikososial bagi setiap orang agar hidup secara manusiawi. RS-RTLH yang dikembangkan Kementerian Sosial RI dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, telah memberikan pengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis fakir miskin. Artinya, bahwa RS-RTLH telah berpengaruh positif terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial fakir miskin tersebut.

Kemudian berkaitan dengan kebijakan sosial, dikemukakan Bessani, Walts, Dalton dan Smith yang dikutip oleh Suharto (2007), bahwa kebijakan sosial merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program sosial lainnya. Mengacu pemikiran tersebut, maka kebijakan sosial yang dikembangkan Kementerian Sosial dalam bentuk RS-RTLH merupakan program dan pelayanan sosial yang relevan dengan amanat undang-undang dan realitas sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, kebutuhan rumah hanya salah satu unsur dari kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan. Atau kebutuhan rumah merupakan sub unsur dari kesejahteraan sosial. Jika mendasarkan pada pemikiran Chambers yang dikutip Mikkelsen (2010) tentang kemiskinan, maka kegiatan RS-RTLH sesungguhnya masih jauh dari upaya pengurangan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin yang berjumlah 30.301 jiwa atau 4,80 persen (BPS, 2010). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan sosial lebih lanjut yang diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi keluarga miskin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan kegiatan RS-RTLH di Kota Banjarmasin, disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria penerima manfaat sesuai dengan pedoman pelaksanaan RS-RTLH, meskipun terdapat penerima manfaat sudah berusia lanjut (60 tahun ke atas). Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan, bahwa penerima kegiatan RS-RTLH adalah fakir miskin pemilik tanah/lahan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah/lahan, tanah mempertimbangkan batas usia. Padahal, batasan umur 60 ke atas sudah menjadi sasaran program pelayanan sosial lanjut usia.
2. Pemantapan pendamping sosial masih dinilai belum cukup, baik berkaitan dengan materi mau pun waktu pemantapannya. Kondisi ini mengakibatkan sosialisasi dan penyiapan kondisi sosial masyarakat (PKSM) menjadi tidak optimal. Indikasinya adalah ada kesalahpahaman pada penerima manfaat, masyarakat sekitar dan LSM berkaitan dengan pelaksanaan RS-RTLH. Pendampingan belum didukung dengan biaya operasional, sehingga kurangnya intensitas pendampingan dan keterbatasan kemilikan data dan dokumen yang berkaitan dengan RS-RTLH.
3. Besarnya dana bantuan sebesar Rp 9 juta dan angkos tukang Rp 1 juta belum cukup untuk merehabilitasi rumah. Bahan-bahan pondasi rumah (*cerucuk*) menyerap dana hampir separuh dari anggaran bahan rumah. Untuk mengatasi kekurangan, sebagian penerima manfaat menjual harta milik, pinjam keluarga atau orang lain. Selanjutnya, honor pendamping sosial tidak dianggarkan, dan belum ada *sharing* dana dari APBD I dan II untuk mendukung kegiatan operasional pendamping sosial tersebut. Kemudian distribusi bantuan dcairkan bulan Novembar, dimana pada

bulan tersebut sudah musim penghujan. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan dan ongkos tukang.

4. Pedoman pelaksanaan RS-RTLH tidak mengatur standardisasi rumah layak huni dan unsur pengendali pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan RS-RTLH mengikuti keinginan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan. Kemudian instansi sosial di Kota Banjarmasin tidak menyusun pedoman teknis RS-RTLH, yang mengatur standardisasi rumah layak huni sebagai acuan kegiatan rehabilitasi rumah.
5. Rehabilitasi rumah dilaksanakan secara serentak, yang sebagian besar dikerjakan oleh tukang, penerima manfaat dan dibantu anggota keluarga. Hal ini dilakukan karena terbatasnya waktu penyelesaian rumah yang disebabkan terlambatnya pencairan anggaran.
6. RS-RTLH sudah memberikan dampak positif dalam peningkatan taraf kesejahteraan sosial fakir miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Meskipun demikian, rumah hanyalah salah satu unsur kebutuhan. Padahal, fakir miskin masih dihadapkan dengan penghasilan rendah, kekurangan pangan, tidak terakses dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga, masih diperlukan program lanjutan untuk pengurangan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.

RS-RTLH hahikatnya adalah program Kementerian Sosial RI. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI hal-hal berikut :

1. Pada Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, perlu dipertimbangkan dan atau dilengkapi dengan :
 - a. Untuk batasan usia penerima manfaat

- perlu dipertimbangkan bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun. Karena mereka sudah masuk kategori lanjut usia, yang menjadi sasaran pada program Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- b. Tim Pengendali kegiatan RS-RTLH dari unsur aparat pemerintah kelurahan dan pendamping sosial. Tim tersebut berperan untuk melakukan pendataan, penggerakan partisipasi masyarakat, penyiapan kondisi sosial masyarakat, memberikan pendampingan kepada penerima manfaat dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Ada rumusan tentang kriteria umum mengenai rumah layak huni, meliputi kondisi fisik rumah, pembagian fungsi ruangan, sarana lingkungan, air bersih dan MCK. Untuk itu perlu melibatkan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perumahan Rakyat dalam penyusunan pedoman umum.
 - d. Tahapan kegiatan mengacu landasan teoretis berkaitan dengan intervensi komunitas, dan penegasan mengenai terminasi.
 - e. Indikator kinerja kegiatan RS-RTLH yang menyangkut aspek pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan kondisi psikologis.
 - f. Besarnya dana bantuan stimulan disesuaikan dengan harga bahan bangunan setempat. Selain menyesuaikan harga bahan bangunan, untuk rehabilitasi rumah yang pada umumnya lokasinya di daerah rawa-rawa, banyak digunakan kayu untuk pemasangan pondasi (cerucuk) yang memerlukan dana hampir separuh anggaran rumah. Sehingga untuk RS-RTLH di Kota Banjarmasin diperlukan anggaran 12 juta untuk satu unit rumah dan 1.5 juta untuk ongkos tukang.
 - g. Penyiapan kondisi sosial masyarakat (PKSM), baik bagi penerima manfaat mau pun lingkungan sekitarnya, sehingga kesalahpahaman dan kecemburuan dapat dihindari, dan tumbuhnya gerakan partisipasi dari lingkungan sekitar.
 - h. Persyaratan tentang surat bukti kepemilikan tanah untuk sebagian keluarga miskin sulit dipenuhi. Direkomendasikan bagi keluarga miskin yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan tanah, memperoleh surat keterangan hak guna tanah dari lurah.
2. Distribusi bantuan dapat disalurkan paling lambat kuartal pertama, sehingga pelaksanaan kegiatan RS-RTLH sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 3. Dialokasikan dana operasional bagi pendamping sosial untuk mendukung kegiatan koordinasi, penggandaan dokumen dan alat tulis.
- Kemudian untuk meningkatkan efektivitas kegiatan RS-RTLH di Kota Banjarmasin direkomendasikan kepada Dinas Sosial provinsi mau pun Kota Banjarmasin hal-hal berikut :
1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menyusun pedoman teknis RS-RTLH sebagai menjabaran “Pedoman Pelaksanaan” dari Kementerian Sosial, yang dilengkapi dengan standarisasi rumah layak huni. Sesuai dengan anggaran yang tersedia, maka direkomendasikan ukuran rumah 5 x 6 m dengan tiga ruangan (ruang tamu, dapur dan kamar tidur). Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja agar bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin untuk membuat desain rumah dan sekaligus Rencana dan Anggaran Belanja (RAB).
 2. Ada alokasi dana dari APBD I dan II untuk mendukung kegiatan operasional pendamping sosial.

3. Setiap penerima manfaat membuat Surat Pernyataan, bahwa rumah yang sudah direhabilitasi akan ditempati sendiri, tidak dijualbelikan dan atau ditempati oleh orang lain minimal 5 tahun sejak direhabilitasi.
4. Setiap penerima manfaat membuat Surat Pernyataan, bahwa rumah yang direhabilitasi tidak dalam status konflik.
5. RS-RTLH hendaknya dapat diintegrasikan dengan program *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR), sehingga terbangun sinergitas antara pemerintah dan sektor swasta. Selain itu sinergitas juga bisa dilakukan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, berkaitan dengan sanitasi lingkungan, air bersih dan fasilitas MCK.
6. RS-RTLH merupakan skema perlindungan yang belum mengatasi akar kemiskinan. Direkomendasikan, penerima manfaat RS-RTLH yang produktif, difasilitasi untuk memperoleh program pemberdayaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Adi, Isbandi Rukminto, (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : CV Rajawali press.
- Badan Pusat Statistik, (2011). *"Data Penduduk Miskin dan Hampir Miskin di Indonesia"*, Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, (2011). *"Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni"*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI.
- Gilbert, Aland dan Josef Gugler, (2007). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Anshori dan Juanda: penterjemah), Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Gunarsa, Singgih D, (1992). *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Hadi, Samsul, Muhamad Lumsuri dan Mutrofin, (2011). *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta : Lakbang Grafika.
- Mikkelsel, Britha, (2010). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Pegangan bagi Praktisi Lapangan* (Mathios Naile: penterjemah), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nugroho, Heru, (1995). *"Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan"*, dalam *Awan Setya Dewanta dkk (Ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, (2010). *"Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial"*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial RI.
- Soetarso, (1980). *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*, Bandung : STKS.
- Sulaiman, Wahid, (2003). *Statistik Non-Parametrik, Contoh Kasus dan Pemecahannya dengan SPSS*, Yogyakarta : ANDI press.

Suharto, Edi, (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik : Peran pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Bandung : Alfabeta.

Website :

Alim, Muhammad Baitul, (2010). “Fungsi Kelompok Untuk Anggotanya”, Jakarta, <http://www.psikologizone.com>

Anonim, “Teori Hierarki Kebutuhan Maslow/ Abraham Maslow - Ilmu Ekonomi”, Jakarta, <http://organisasi.org>, download 21 Januari 2012.

Endah SP, (2012). Konsep Dasar Kebutuhan Dasar Manusia, Jakarta, <http://www.scribd.com>

Yumantoko, “Fungsi Sebuah Rumah”, Jakarta, <http://yumantoko.blogspot.com>,, download 21 Januari 2012.

Widodo, Hertanto dari Islamic, Ekonomi and Public Policy, Jakarta, <http://hertantowidodo.com>, download 21 Januari 2012.